

UPAYA MEMADUKAN PENELITIAN DAN PRAKSIS PERUBAHAN

SEBUAH REFLEKSI ANTARA INTELEKTUAL DAN AKTIVISME

Ika Wahyu¹

Abstract

The description is trying to integrate the researchers' and the activists' interests. Such integration also means the effort of creating the convergence spot between the organic intellectual and the mechanic intellectual basics of thinking, between the theoretical and practical interests, and between the academic and public interests.

Peran intelektual dalam perancangan dan perubahan sosial telah lama menjadi bahan perdebatan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Secara ringkas, bisa digambarkan bahwa sebagian berpendapat bahwa intelektual seharusnya "turun ke bumi," berumah di atas angin." Artinya, tugas utamanya adalah bergelut dengan teori dalam bidang yang dipelajarinya di universitas atau lembaga-lembaga penelitian, karena peran seperti itulah yang memang harus dimainkannya dalam

proses perubahan sosial. Biarlah para politisi, teknolog, dan ekonom saja yang terlibat dalam perancangan dan perubahan sosial. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa intelektual seharusnya "turun ke bumi," berpar-tisipasi langsung dalam proses perancangan dan perubahan sosial. Perdebatan yang kelihatan terlalu "hitam-putih" itu tampaknya kini sudah mulai dilupakan. Bukan saja karena keduanya sama-sama benar sekaligus sama-sama salah,

¹ Peneliti pada Yayasan AKATIGA

atau karena masing-masing punya kelemahan epistemologis sekaligus saling melengkapi, tetapi juga karena terlalu "hitam-putih" dan terlalu "steril", sementara kondisi-kondisi sosial dan politik yang menjadi latar belakangnya terus berubah.

Sekadar contoh, perdebatan itu akan sulit menjelaskan banyaknya aktivis organisasi non pemerintah (ornop) di luar universitas yang melibatkan diri dalam penelitian-penelitian akademis, dan juga sebaliknya, makin banyaknya intelektual universitas yang melibatkan diri dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh ornop-ornop, perancangan sosial, dan pengambilan kebijakan. Memang ini bisa saja menjadi soal pilihan. Namun, jelas jauh lebih kompleks dari sekadar pilihan "berumah di atas angin" atau "turun ke bumi," karena melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur dan formasi kultural, sosial, ekonomi, dan politik, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal, sehingga bukan saja akan menentukan peran intelektual dalam perancangan dan perubahan sosial, tetapi juga menentukan arah dan bentuk keberpihakan intelektual.

Meminjam istilah Gramsci, memadukan antara kepentingan peneliti dan aktivis adalah mengupayakan terciptanya

titik konvergensi antara basis pemikiran kalangan intelektual organisasi dan intelektual mekanis, antara kepentingan teori dan praksis dan kepentingan akademis dan publik. Dalam tesisnya yang kesebelas tentang Feuerbach, Marx menyatakan, "sampai saat ini para filsuf baru menafsirkan dunia, soalnya adalah bagaimana mengubah dunia." Ini tentunya bukan sekadar seruan untuk aktivisme membabi-butu. Dari tulisan-tulisannya yang lain jelas dia akan setuju dengan tesis berikutnya: jika kita ingin mengubah dunia, kita harus mempelajarinya secara menyeluruh, hati-hati, dan teliti.

Hal yang selalu dikritik kalangan aktivis terhadap para peneliti atau kalangan akademisi sosial ialah pemisahan antara teori dengan kepentingan. Padahal, menurut Habermas, upaya untuk membersihkan kepentingan itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah kepentingan, yakni kepentingan untuk membersihkan kepentingan dari ilmu-ilmu sosial. Kepentingan pembersihan itu adalah untuk membangun obyektivitas guna mengukuhkan eksistensi ilmu sosial yang setara dengan ilmu alam. Upaya ini sama sekali tidak dirancang untuk memperoleh kebenaran tentatif yang proses pengupayaannya tidak akan pernah mengenal kata akhir dalam

sejarah kehidupan manusia, melainkan merupakan sebuah pencarian legitimasi politik dalam ruang relasi kekuasaan — negara/pemodal *vis a vis* rakyat (lihat Ignas Kleden, 1987; dan Wallerstein, 1996).

Dalam sebuah makalah yang berjudul *Kontestasi antara Massa dan Negara: Massa Tanpa Pemimpin*, antropolog dari Universitas Gadjah Mada, Arif Mundayat menyatakan, dominasi kapitalisme telah melahirkan sebuah proses pemisahan yang kuat antara lapisan akademik dan buruh. Dalam hal ini lapisan akademik memiliki kehidupannya sendiri yang sama sekali berbeda dengan masyarakat tingkat *grass root* (baca: buruh). Secara sosiologis, kata Mundayat, mereka hidup dalam dunia mereka sendiri-sendiri secara *encapsulated*. Benar bahwa mereka hidup di dalam alam dan bahasa yang sama, namun masing-masing mengembangkan dunianya sendiri-sendiri yang hampir tak pernah bersentuhan. Memang, ada upaya sentuhan lapisan akademik, baik itu yang berbentuk LSM, mahasiswa, akademisi, dan lainnya, ke tingkat *grass root*, namun sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi bagian dari *grass root* itu sendiri. Situasi inilah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara *late capitalism*. Di banyak negara itu,

masyarakat akademik sering kali juga buruh itu sendiri. Mereka adalah buruh terdidik yang benar-benar memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang menjadi tokoh, ketimbang menjadi lapisan yang bergantung pada inisiatif lapisan yang lainnya. Di Indonesia, banyak lapisan akademik yang berupaya mengondisikan lapisan buruh untuk memiliki kesadaran ideologis yang kuat, tetapi dalam praktiknya hal itu lebih membuat lapisan buruh itu justru tergantung pada mereka sehingga tidak melahirkan pemimpin dari kalangan mereka sendiri.

Seperti juga gerakan sosial yang mengangankan revolusi, hampir semua ilmu sosial juga mengandung unsur utopianisme tertentu. Hal ini jarang disadari oleh peneliti maupun kalangan intelektual yang menganggap kaum aktivis sebagai pemimpin. Bagaimanapun, setiap ilmuwan sosial sesungguhnya mengembangkan gagasan ideal tentang "masyarakat yang lebih baik" dan terus berpikir tentang bagaimana mencapai bentuk semacam itu. Salah satu perdebatan terbesar dalam ilmu sosial adalah mengenai manusia sebagai agen dan struktur sosial. Manusia jelas memiliki kemampuan untuk mengubah aturan, mengubah

struktur masyarakat mereka, atau dengan kata lain memiliki kemampuan sebagai agen yang melakukan perubahan. Revolusi sosial adalah perwujudan nyata dari kekuatan kreativitas manusia dan kehendakkuasa mengubah struktur sosial. Namun, kita juga harus mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hal apa yang dapat diubah dan seberapa jauh mereka mampu mengubahnya. Setiap gerakan sosial, disadari atau tidak, berangkat dari analisis tertentu terhadap problem-problem sosial yang ada dan metode-metode yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Masalahnya, masih banyak aktivis yang percaya bahwa sebagian besar, bahkan semua, persoalan sosial bisa diselesaikan melalui mobilisasi massa militan, tanpa punya kesabaran menganalisis maksud dan tujuan mobilisasi itu sendiri dengan tajam. Hal inilah yang selalu menjadi perdebatan di antara kalangan intelektual dan aktivis gerakan. Aktivis percaya bahwa suatu perubahan sosial hanya bisa dicapai melalui revolusi dengan penggulingan kekuasaan. Kepercayaan ini jelas bukan tanpa dasar/asumsi tertentu. Kepercayaan ini berakar dari pengetahuan akan perubahan-perubahan sosial yang pernah terjadi dalam sejarah dan pengalaman mereka dalam mengorganisasi rakyat. Dalam peng-

alamannya, aktivis akan selalu berhadapan dengan tirani kekuasaan (militar). Contohnya, aktivis buruh percaya bahwa buruh akan bisa menang ketika sudah menguasai alat produksi.

Lalu bagaimana dengan pekerja ornop, apakah mereka berperan sebagai aktivis atau intelektual sosial? Ornop menghadapi krisis mendasar karena menyangkut persoalan ideologis, sehingga jika tidak teratasi akan berpengaruh besar terhadap masa depan mereka. Namun, sebagian besar ornop justru tidak menyadari bahwa mereka pada saat ini berada di persimpangan jalan: antara pilihan mengidentifikasi diri sebagai *civil society* atau masyarakat sipil dalam konteks "demokratisasi" melalui sistem relasi politik dan ekonomi model neoliberalisme, atau memilih jalan sebagai bagian dari "gerakan sosial" dalam rangka transformasi sosial menuju masyarakat demokrasi kerakyatan, yaitu suatu tatanan relasi sosial ekonomi dan politik yang berlandaskan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

Selama ini ornop diperebutkan untuk menjadi pendukung kebijakan neoliberalisme, keinginan serta cita-cita untuk tetap menjadi pembela kaum marginal, dan kedaulatan rakyat.

Saat ini kita menyaksikan bangkitnya gerakan perlawanan rakyat di mana-mana atau awal kebangkitan gerakan sosial secara global, tetapi pada saat yang sama kita juga menyaksikan menguatnya paham masyarakat liberal yang dipromosikan melalui penguatan masyarakat sipil yang banyak melibatkan ornop. Akibatnya, tak pelak lagi, ornop berada di persimpangan jalan.

Di sisi lain, ada tendensi di kalangan aktivis demokrasi, mereka cenderung mengikuti rekomendasi solusi *mainstream* agar mereka meninggalkan politik, menyerahkan urusan politik pada elite, dan kembali melakukan kegiatan dalam masyarakat sipil. Harapannya, dengan melakukan itu akan ada sebuah perubahan. Solusi seperti itu, terbukti tidak banyak membuahkan hasil. Gagasan *mainstream* dalam dunia internasional tentang demokrasi menekankan pada pembangunan institusi-institusi pada tingkat atas, menyerahkan urusan politik pada elite, dan prodemokrasi bergerak kembali pada *civil society*. Dengan melakukan itu, gerakan prodemokrasi masih tetap ada. Mereka harus diakui melakukan banyak hal yang bagus. Konsekuensi pilihan itu membuat kalangan aktivis sendiri merefleksikan sistem massa mengambang zaman Soeharto.

Aktivis demokrasi terpecah-pecah, menyebar, tidak terorganisasi, dan hampir-hampir tidak memiliki keterkaitan dengan rakyat. Mereka mirip demokrat-demokrat yang mengambang.

Kalangan aktivis selalu berharap penelitian dapat menghasilkan suatu formula ampuh untuk melakukan pengorganisasian atau pun gerakan massa. Kepentingan inilah yang kerap kali bertentangan dengan kepentingan penelitian yang bertujuan eksplanatoris atau pun yang hanya bersifat deskriptif. Berdasarkan itu, peneliti maupun kalangan akademisi dari waktu ke waktu berusaha mencari strategi melakukan penelitian atau yang lebih dikenal sebagai metodologi. Penggunaan metode kualitatif dari waktu ke waktu semakin menguat akibat sangat lemahnya metode kuantitatif untuk menjawab persoalan-persoalan subjektif informan. Dalam metode kuantitatif, peneliti diajak untuk dengan cepat membuat generalisasi segala fenomena yang muncul. Dengan metode kualitatif, banyaknya fenomena atau pun menariknya satu fenomena kadang mengajak peneliti tercebur dan hanyut dalam hal yang ditelitinya. Keduanya memang mempunyai kelemahannya masing-masing, namun di sisi lain, kedua metode tersebut juga

mempunyai kelebihanannya sendiri dalam mengungkap fenomena dan realitas sosial. Permasalahan metodologi kerap kali menjadi hal yang membedakan antara peneliti dan aktivis. Bila aktivis masuk dalam masyarakat sebagai bagian dari masyarakat tersebut, maka peneliti dengan konsep akademisnya berusaha menjadi 'outsider' dari sebuah masyarakat.

Pada awal 1980-an sekelompok aktivis ornop dan mahasiswa yang sering terlibat dalam aksi-aksi sosial lokal mendirikan API (Asosiasi Peneliti Indonesia) dan memperkenalkan apa yang disebut *Participatory Action-oriented Research*, PAR (Penelitian Berhaluan Aksi Partisipatif). Sosiolog Ignas Kleden (1997) menyebutkan bahwa PAR memiliki empat kriteria. *Pertama*, jika dalam penelitian empiris orang-orang yang menjadi sasaran kajian tidak tahu-menahu dengan hasil-hasil temuan riset, maka dalam PAR orang-orang itulah justru yang pertama-tama harus tahu dan menggunakan hasil-hasil temuan tersebut. *Kedua*, orang-orang yang menjadi sasaran penelitian sosial harus tidak diperlakukan sebagai sasaran observasi ilmiah semata, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam penelitian tentang mereka sendiri. *Ketiga*, tujuan PAR bukanlah hanya untuk

menghimpun data tentang kelompok orang-orang yang dikaji, tetapi untuk menanamkan pengertian yang lebih baik pada mereka serta memelihara solidaritas terhadap mereka. Ini berarti bahwa pada analisis terakhir tujuan PAR tidaklah hanya pada meluasnya lembaga pengetahuan, tetapi pada mendorong aksi bagi perubahan sosial. *Keempat*, mengingat tujuan-tujuan khusus PAR tersebut, maka penguasaan metodologi penelitian saja belumlah cukup, melainkan harus dilengkapi dengan suatu komitmen sosial yang jelas. Beberapa waktu terakhir ini, muncul juga metode baru yang diharapkan dapat memperlihatkan kehidupan sehari-hari masyarakat yang kita teliti, metode itu dikenal dengan *life story* dan metode *oral history* yang mengajak informan yang kita teliti untuk menceritakan kembali sejarah versi mereka dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki.

Yang menjadi persoalan sekarang: bagaimana peneliti di Indonesia seharusnya memposisikan diri dalam menyikapi ketidakadilan? Apakah penelitian jalan terus dengan mengedarkan kuesioner yang terangkai indah tanpa kepekaan sosial pada perjuangan keseharian mereka yang tersisihkan? Menurut salah seorang dokter humanis, yang juga aktivis dan antropolog,

Paul Farmer, yang dipertaruhkan oleh peneliti bukan hanya perdebatan akademis dengan adu kecanggihan teori, tetapi sebuah sikap keberpihakan terhadap korban struktural sebuah "patologi kekuasaan". Dialektika antara diri seseorang (*the self*) dengan dunia sosio-kultural itu melalui tiga momen dialektika. *Triad* dialektika itu adalah eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi; ketiga momen dialektik ini saling beroperasi secara simultan (Berger dan Luckmann, 1990:xx dan 6). Menurut Bourdieu, kekuasaan bekerja bukan hanya lewat kelas dalam arti hubungan yang tidak adil dengan *means of production* di dunia ekonomi, tetapi lewat produksi dan reproduksi "modal simbolis". Di Indonesia, wacana kebudayaan dipakai untuk meminggirkan penciptaan budaya kaum lemah dan melihat perjuangan sehari-hari mereka sebagai sesuatu yang tidak punya nilai, sebagai cermin peradaban.

Soedjatmoko, satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, (1984:12) menggarisbawahi:

...pelaksanaan program-program pemerintah pusat makin lama makin memerlukan penglihatan permasalahan dari dalam dan dari bawah, agar program-program itu dapat berakar

kepada dinamika masyarakat sendiri, dan dapat hidup dari kekuatan sendiri dan bukan dipaksakan dari atas.

Menurut Soedjatmoko juga,

...perlunya para peneliti mulai mawas diri dan mencoba mengungkapkan dalam dirinya sendiri class bias-nya yang secara tidak sadar mempengaruhi sikap penghadapan dirinya sebagai peneliti dan desain penelitiannya. Class bias ini juga nampak pada sangat kurangnya penelitian-penelitian tentang elite Indonesia sendiri, misalnya tentang perubahan-perubahan di dalam susunan dan dinamika internal golongan elite, proses-proses pengambilan keputusan, struktur kekuasaan, serta hambatan-hambatan yang berakar padanya yang menghalangi pelaksanaan yang efektif program-program pembangunan.

Dalam pandangan aktivis maupun kalangan awam ilmu sosial terdapat stigma bahwa ilmu sosial pada dasarnya tidak jelas. Walau hasil dari sebuah penelitian sosial eksplanatoris/deskriptif mungkin tidak meyakinkan kalangan aktivis atau pun organisasi yang berkepentingan, sebagai peneliti kita tetap harus melakukan penelitian. Bahwa ada sekelompok orang yang menolak temuan kita, tidak berarti bahwa semua orang akan menolaknya, karena mungkin juga ada banyak orang yang terdorong oleh informasi

dan temuan kita yang akan berjuang untuk mengubah kebijakan tertentu. Adalah wajar bahwa ilmu sosial didorong oleh keinginan untuk memperbaiki masyarakat. Kebanyakan orang akan menganggapnya percuma jika tidak mampu menjawab persoalan-persoalan sosial. Namun demikian, kita harus tahu bahwa niat baik ternyata tidak cukup untuk menghasilkan ilmu yang baik pula. Untuk menghasilkan ilmu yang baik kita harus berpikir serius dan kreatif dalam mengidentifikasi masalah, membuat pengamatan kritis terhadap asumsi-asumsi yang ada, bekerja keras untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan, serta berpikir terbuka serta berani mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan keyakinannya.

Ada juga ilmuwan sosial yang tidak berusaha memberikan penjelasan terhadap masalah sosial tertentu dan tidak percaya bahwa ilmu sosial seharusnya dirancang untuk membawa perubahan sosial. Mereka merancang penelitian untuk menafsirkan perilaku manusia, bukan untuk menjelaskan apa yang menyebabkan orang bertindak. Mereka juga cukup terbuka untuk mengakui bahwa ada sekian banyak penafsiran berbeda yang sama sahnya terhadap apa yang mereka teliti. Masyarakat

dalam pandangan mereka bukanlah seperti pasien yang gejala-gejala penyakitnya perlu didiagnosa dan disembuhkan, melainkan lebih seperti permainan. Tugas ilmuwan adalah memahami aturan mainnya sehingga kita semua dapat bermain lebih baik.

Bahkan saat mempelajari masyarakat lain, kita mau tidak mau mengambil masyarakat sendiri sebagai perbandingan. Margaret Mead, antropolog Amerika yang tersohor, pernah mengatakan bahwa tujuannya mempelajari masyarakat lain untuk tahu bagaimana mengubah masyarakatnya sendiri. Penelitiannya tentang seksualitas remaja di Samoa memperlihatkan bahwa pubertas bukanlah fase traumatik dalam kehidupan seperti halnya di masyarakat Barat. Apa yang selama ini dianggap alamiah atau tak terhindarkan ternyata bersifat kultural dan terbuka bagi perubahan. Namun, walaupun kesimpulannya mungkin benar, penelitiannya juga memperlihatkan bahaya dari niat baik. Seperti ditunjukkan sejumlah antropolog lain, lingkup informasinya tentang Samoa sangat terbatas dan ia juga keliru menafsirkan banyak hal dalam kebudayaan setempat.

Pengalaman yang didapat seorang peneliti sosial dari bergumul dengan mereka yang 'termarginalkan' bisa menghasilkan karier, tetapi juga bisa menghasilkan senjata untuk menyerang mereka, yang artinya peneliti berhutang besar pada kaum yang 'tersisihkan.' Akhirnya, hubungan antara peneliti dan aktivis gerakan sosial seharusnya mencoba - meminjam istilah Gramsci - 'memberi kerangka kembali' (*reframe*) pada ke-

nyataan sosial yang kompleks dan melihat perbedaan sebagai ketegangan yang perlu ditangani ketimbang diabaikan. Dengan kata lain, diskusi yang sungguh-sungguh mengenai kemungkinan mempertemukan bentuk-bentuk perjuangan yang ada, dengan berbagai kapasitas lembaga/keorganisasian maupun individu, jauh lebih bermanfaat ketimbang menonjolkan perbedaan dan mempertentangkannya.

Daftar Pustaka

- Dickinson, Torry dkk. 2001. *Fast Forward: Work, Gender and Protest in A Changing World*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.
- Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist Press.
- Hardiyanto, Barid. 2005. *Pendidikan Rakyat Petani: Perjuangan Perlawanan Menuntut Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hutchinson, Jane dkk. 2001. *Organising Labor in Globalising Asia*. London: Routledge.
- Kompas. 2001. 'Aksi-aksi Politis Para Buruh', 22 Juni.
- Indra Jaya Piliang. 2002. 'Banten: Jawara dan Pustaka', *Suara Pembaruan*.30 Mei.

